

Judul : Perbaiki Tata Kelola Riset
Tanggal : Rabu, 01 Februari 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Perbaiki Tata Kelola Riset

Badan Riset dan Inovasi Nasional perlu berfokus untuk mengimplementasikan jalannya riset dan inovasi. Kondisi saat ini, kelembagaan BRIN dinilai *superbody* sehingga perlu pengawasan.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah upaya masih diperlukan untuk memperbaiki tata kelola riset dan inovasi di Indonesia. Salah satunya memastikan kehadiran lembaga pengawas yang independen bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ini agar BRIN bisa berfokus untuk mengimplementasikan jalannya riset dan inovasi.

Ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Gunadi menilai tiga fungsi BRIN secara bersamaan, yakni membuat kebijakan, mengimplementasikan, dan mengontrol jalannya riset, membuat BRIN menjadi lembaga yang *superbody*. Karena itu, BRIN membutuhkan lembaga lain yang dapat memonitor dan mengevaluasi tata kelola riset.

Maka, perlu penataan ekosistem riset seperti perbaikan soal birokratisasi anggaran untuk pendanaan riset serta pemisahan antara kebijakan dan implementasi. Dengan fungsi dan kewenangan BRIN yang terlalu besar saat ini pun dinilai melanggar prinsip tata kelola dan rentan disalahgunakan.

"Seharusnya perkembangan dan ekosistem riset yang dilakukan oleh lembaga seperti BRIN dapat menguji unsur politisasi," ujar Gunadi yang juga pengajar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK)

Universitas Gadjah Mada, saat dihubungi Selasa (31/1/2023).

Penataan riset, menurut dia, harus segera dilakukan. Hal ini lantaran pembentukan BRIN bertujuan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengembangan ekosistem riset yang baik.

Ia menyampaikan, selama dua tahun terbentuknya lembaga ini, program BRIN mestinya tidak hanya berbasis kinerja atau hanya menghasilkan keluaran seperti publikasi ilmiah (*paper*). Apalagi, dalam keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, BRIN dapat mendorong para periset agar menghasilkan luaran seperti buku, kekayaan intelektual (paten), ataupun hak cipta.

Desakan penggantian

Terkait desakan untuk mengganti Kepala BRIN, menurut Gunadi, masalah penataan riset tidak bisa diselesaikan hanya dengan penggantian kepemimpinan. Apalagi, kondisi ekosistem riset di Indonesia belum baik. Mestinya ekosistem riset yang baik itu ditunjukkan dengan menata, mengelola, menempatkan sumber daya, dan mendanai riset-riset secara berkualitas dan terpadu.

Desakan penggantian Kepala BRIN ini merupakan salah satu hasil kesimpulan rapat dengar

pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dan BRIN di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (30/1). Selain mengganti Kepala BRIN, Komisi VII juga merekomendasikan untuk melakukan audit khusus anggaran BRIN tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rekomendasi DPR untuk mengganti Kepala BRIN didukung sejumlah pihak, di antaranya Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi (MPI). Dalam rilisnya, MPI menyebut rekomendasi DPR sejalan dengan banyak pandangan dari para periset, masyarakat, dan komunitas ilmiah.

Saat dihubungi, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan dirinya belum bisa memberikan tanggapan secara lengkap terkait rekomendasi DPR tersebut. Namun, saat RDP berlangsung Handoko menegaskan, BRIN akan segera melakukan investigasi internal terkait segala hal yang telah menjadi masukan dari Komisi VII.

Menanggapi rekomendasi dari Komisi VII DPR itu, Penasihat Senior Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Yanuar Nugroho, Selasa (31/1), pun menyebut penggantian Kepala BRIN bukan solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah terkait ekosistem riset di Indonesia. Namun, upaya yang pa-

ling mendesak untuk dilakukan saat ini adalah menata ekosistem riset secara keseluruhan.

"Secara substansial, tata kelola riset dan inovasi kita memang masih berantakan. Namun, hal yang perlu dilakukan saat ini adalah penataan riset. Jadi, solusinya bukan pemberhentian, melainkan meminta Kepala BRIN untuk melakukan penataan riset," ujarnya.

Sejumlah upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki ekosistem riset di Indonesia di antaranya meningkatkan anggaran dan memperbaiki berbagai infrastruktur penelitian. Di sisi lain, BRIN juga harus memberikan kepastian karier dan kesejahteraan finansial bagi para peneliti, periset, maupun perekayasa.

Selain itu, Yanuar juga menyatakan, BRIN seharusnya tidak menjalankan tiga fungsi secara bersamaan, yakni membuat kebijakan, mengimplementasikan, dan mengontrol jalannya riset. Seharusnya, BRIN hanya bertindak sebagai pihak yang mengimplementasikan jalannya riset dan inovasi. Sementara fungsi pembuat kebijakan dan kontrol riset dilakukan oleh lembaga lain.

Ia pun menilai langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan Kepala BRIN saat ini tidak semuanya benar ataupun

tidak semuanya salah. Salah satu contoh kebijakan yang benar, menurut Yanuar, adalah membuat fasilitas laboratorium yang bisa diakses oleh semua pihak.

Namun, kebijakan BRIN dinilai salah terkait birokratisasi pendanaan riset di internal BRIN. Langkah ini membuat peneliti susah mendapat anggaran.

Gagal

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto, Selasa (31/1), menyebut Kepala BRIN gagal mengonsolidasikan lembaga, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran. Akibatnya, kegagalan itu memunculkan berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.

"Keinginan untuk mengintegrasikan lembaga riset akhirnya tidak terjadi. Yang bisa dilakukan Kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran dan program tidak jalan," ucapnya.

Andi Yuliani Paris, anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Amanat Nasional, menilai BRIN saat ini hanya berfokus pada pengembangan publikasi ilmiah tanpa menghasilkan inovasi. Padahal, inovasi itu penting karena dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. (MTK/204)